

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Taiwan merupakan negara di Kawasan Asia Timur yang memiliki hubungan yang rumit dengan Tiongkok. Pemerintah Tiongkok menerapkan prinsip *One China Policy*, yang menyatakan bahwa Taiwan merupakan bagian dari Tiongkok dan Tiongkok satu-satunya negara yang berdaulat dan sah.¹ Di tengah tekanan *One China Policy*, yang menekan Taiwan, Tiongkok tetap menjadi mitra dagang utama Taiwan.² Kuatnya hubungan ekonomi antara Taiwan dan Tiongkok kemudian menimbulkan kekhawatiran Taiwan terhadap meningkatnya ketergantungan ekonomi pada pasar Tiongkok, sebagian besar aktivitas ekspor dan investasi Taiwan terhubung dengan Tiongkok. Kondisi ini mendorong Taiwan memperluas kerja sama ekonomi dengan berbagai negara untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar Tiongkok.³

Pada tahun 2016 Pemerintah Taiwan, Presiden Tsai Ing-wen memperkenalkan kebijakan *New Southbound Policy* untuk mempromosikan beberapa program kerja untuk kerja sama global. Salah satu kebijakan baru yang dipromosikan oleh Presiden Tsai Ing-Wen adalah kebijakan *New Southbound Policy*. Melalui kebijakan ini pemerintah Taiwan memperluas pengaruh dan

¹ Taiwan center for security studies CCS, "The One China Principle vs. The One China Policy," n.d., <https://taiwancss.org/the-one-china-principle-vs-the-one-china-policy/>.

² Joshua P. Meltzer, "Taiwan's Economic Opportunities and Challenges and the Importance of the Trans-Pacific Partnership," 2014.

³ Henrietta Levin and Hugh Grant-Chapman, "Understanding Global South Perspectives on Taiwan," 2026, <https://www.csis.org/analysis/understanding-global-south-perspectives-taiwan>.

memperkuat kerja sama ke negara litas Kawasan dan mengurangi ketergantungan pada pasar tunggal Tiongkok. Kebijakan ini merupakan pembaharuan dari kebijakan sebelumnya yaitu kebijakan *Go South* pada era pemerintahan Presiden Lee Teng-Hui (1994-1999) dan Presiden Chen Sui-Bian (2000-2008).

Negara-negara yang menjadi target mitra kerja sama *New Southbound Policy* di Kawasan Indo-Pasifik adalah sepuluh negara di Asia Tenggara yaitu Indonesia, Brunei Darusalam, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Myanmar, Filipina, Kamboja dan Laos. Enam negara di Asia Selatan India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Srilangka dan Buthan lalu dua negara Oceania Australia dan New Zealand. Kebijakan ini pertama kali di implementasikan pada awal 2017.⁴ *New Southbound Policy* dirancang sebagai kerangka kerja sama yang memiliki fokus utama yakni yang mempromosikan kerja sama ekonomi dan perdagangan, Pertukaran Masyarakat, Pendorong pertukaran sumber daya, konektivitas regional.⁵ Melalui empat rencana promosi tersebut, Taiwan berupaya mendiversifikasi ekonomi dan perdagangannya yang bergantung pada pasar Tiongkok.⁶ Asia Tenggara di posisikan menjadi Kawasan yang diprioritaskan dalam *New Southbound Policy* dikarenakan pertumbuhan ekonominya. Dinamika ekonomi dan geopolitik Asia Tenggara menjadikan Kawasan ini sebagai target strategis bagi negara Asia Timur dalam memperluas jaringan ekonomi mereka.⁷

⁴ Dyah Putri Kartikasari, "No Kepentingan Taiwan Melalui New Southbound Policy (NSP) Di Masa KePresidenan Tsai Ing-Wen Tahun 2017-2018 Title," no. NSP (2019): 12.

⁵ Bonnie S Glaser, *The New Southbound Policy*, 2018.

⁶ Kwei Bo Huang, "Taiwan's New Southbound Policy: Background, Objectives, Framework and Limits," *Revista UNISCI* 2018, no. 46 (2018): 47–68, <https://doi.org/10.5209/RUNI.58376>.

⁷ Sharon Seah et al., "The State of Southeast Asia," 2025, 1–78, www.iseas.edu.sg.

Di Asia Tenggara Indonesia merupakan negara mitra prioritas dalam kebijakan *New Southbound Policy*. Prioritas tersebut tercermin dari penetapan Indonesia sebagai mitra prioritas dalam upaya Taiwan memperkuat hubungan substantif dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.⁸ Posisi Indonesia dalam *New Southbound Policy* menunjukan peran Indonesia dalam perluasan hubungan ekonomi eksternal Taiwan, terutama melalui peningkatan kerja sama, perdagangan, investasi dan kolaborasi ekonomi bilateral. Indonesia juga memiliki pasar potensial dengan populasi penduduk terbesar ASEAN, upah pekerja yang murah, dan tenaga kerja yang melimpah menawarkan peluang pasar dan investasi yang signifikan bagi Taiwan.⁹ Sejalan dengan tujuan *New Southbound policy* untuk mendiversifikasi ekonomi sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap pasar Tiongkok.¹⁰

Indonesia punya karakteristik ekonomi yang penting bagi Taiwan dalam upaya Taiwan hubungan ekonominya dengan negara selatan. Upaya Taiwan dalam memperluas hubungan ekonominya di negara selatan tidak lepas dari dinamika politik kawasan *One China Policy*. Sejak menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Tiongkok pada tahun 1950, Indonesia secara teguh berpegang pada prinsip *One China Policy*, sehingga secara *de jure* Indonesia tidak mengakui Taiwan sebagai sebuah negara. Namun dibawah kebijakan *New Southbound Policy* Indonesia adalah mitra strategis Taiwan dalam upaya Taiwan dalam mendiversifikasi

⁸ Sinaga Yuni Arisandy, "No Title," *ANTARA*, 2023.

⁹ Lotta Danielsson., "Potential US Business Opportunities under Taiwan's New Southbound Policy," 2017.

¹⁰ ROC Taiwan, "Presiden Tsai Ing-Wen Mengadopsi Pedoman New Southbound Policy," *Www.Roc-Taiwan.Org*, 2023, https://www.roc-taiwan.org/uploads/sites/59/2016/09/NSP_Full.pdf.

pasar. Hubungan kedua negara sebatas hubungan kerja sama ekonomi yang di tandai dengan mulai beroperasinya kamar dagang Taiwan, Taipei Economic and Trade Office (TETO), di Jakarta dan kantor dagang dan ekonomi Indonesia di Taipei (KDEI). Kantor perdagangan ini merupakan forum yang memfasilitasi hubungan kerja sama seperti investasi, kerja sama dagang, ekspor impor, budaya Pendidikan dan kerja sama disektor lainnya. Dalam hubungan kerja sama bilateral Indonesia dan Taiwan sudah menjalin kerja sama sejak tahun 1970 hingga sekarang.¹¹ Lalu di akhir tahun 2015 di Surabaya dibuka kantor dagang baru dengan nama Kantor Perdagangan dan Ekonomi Taipei di Surabaya.¹² Dalam upaya meningkatkan promosi perdagangan antar kedua negara, Menteri perekonomian Taiwan bersama dengan organisasi non komersial “Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) mendirikan “Taiwan Trade Center, di Jakarta”.

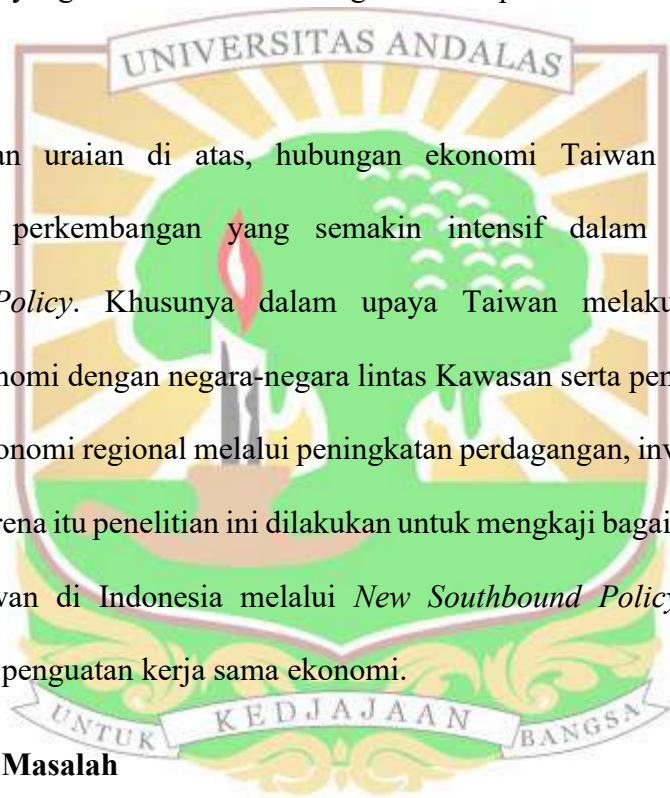
Perwujudan kerja sama ekonomi Taiwan dan Indonesia dibawah kerangka *New Southbound Policy* dapat dilihat pada sektor industri manufaktur. Kerja sama ini diperkuat melalui wadah formal Indonesia-Taiwan Industrial Collaboration Forum (ITICF) yang secara rutin diadakan mempertemukan para pelaku industri untuk pembaharuan teknologi manufaktur. Forum ITICF ini difasilitasi sebagai bagian dari kebijakan New Southbound Policy (NSP) Taiwan yang bertujuan memperkuat integrasi industri dan investasi dengan negara mitra, termasuk Indonesia. Melalui forum tersebut, pelaku industri Taiwan dan Indonesia menjajaki

¹¹ Betrix Silitonga, “Indonesia ’ s International Trade Opportunities (Based on 2019 Taiwan Partner Country Case Studies) Peluang Perdagangan Internasional Indonesia (Berdasarkan Studi Kasus Negara Mitra Taiwan Tahun 2019)” 1, no. 10 (2023): 921–32.

¹² “Informasi Kehidupan Negara Setempat,” 2024.

peluang kerja sama melalui pengembangan investasi, kolaborasi industri, dan pertukaran teknologi manufaktur.¹³ Salah satu bentuk kerja sama yang berkembang melalui forum tersebut terdapat pada sektor tekstil. Dalam sektor ini, *Taiwan Textile Federation* (TTF) berperan memfasilitasi kolaborasi antara pelaku industri Taiwan dan Indonesia, yang kemudian mendorong investasi perusahaan tekstil Taiwan di Indonesia.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, hubungan ekonomi Taiwan dan Indonesia menunjukkan perkembangan yang semakin intensif dalam kerangka *New Southbound Policy*. Khususnya dalam upaya Taiwan melakukan direvikasi hubungan ekonomi dengan negara-negara lintas Kawasan serta penguatan jaringan Kerja sama ekonomi regional melalui peningkatan perdagangan, investasi dan kerja sama. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana diplomasi ekonomi Taiwan di Indonesia melalui *New Southbound Policy* Taiwan yang berfokus pada penguatan kerja sama ekonomi.



1.2 Rumusan Masalah

Kebijakan *New Southbound policy* sebagai kebijakan luar negeri Taiwan berfokus pada penguatan hubungan Taiwan dengan negara-negara Selatan. Melalui kebijakan Taiwan berupaya mendiverifikasi pasar, dan kerja sama internasional Taiwan. Kebijakan ini menargetkan negara-negara selatan seperti Indonesia,

¹³ KDEI, "Dorong Kerja Sama Perindustrian, KDEI Taipeii Fasilitasi The 4th Indonesia-Taiwan Industrial Collaboration Forum," n.d., <https://www.kdei-Taipei.org/news/dorong-kerja-sama-perindustrian-kdei-Taipei-fasilitasi-the-4th-indonesia-taiwan-industrial-collaboration-forum-2055.html>.

¹⁴ Betrix Silitonga, Universitas Negeri Manado, and Widyastutik Widyastutik, "Impact of Indonesia-Taiwan Bilateral Cooperation on Indonesia Economy Impact of Indonesia-Taiwan Bilateral Cooperation on Indonesia Economy" 2, no. December (2021): 1–18.

melalui kerja sama dalam perdagangan, investasi, pertukaran bakat dan pertukaran sumber daya. Namun, di tengah keterbatasan ruang diplomatik Taiwan dibawah tekanan *One China Policy*, serta meningkatnya pengaruh Tiongkok di Kawasan Indo-Pasifik, hubungan Taiwan dan Indonesia justru terus berkembang melalui berbagai bentuk kerja sama, diperkuat dibawah kerangka *New Southbound Policy*. Kondisi ini menunjukkan adanya pemanfaatan instrumen ekonomi sebagai bagian dari strategi kebijakan luar negeri Taiwan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana *New Southbound Policy* Taiwan di Indonesia dapat dianalisis sebagai praktik diplomasi ekonomi pada tahun 2016–2024.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian. “Bagaimana diplomasi ekonomi Taiwan melalui *New Southbound Policy* di Indonesia pada tahun 2016-2024?”

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pelaksanaan diplomasi ekonomi Taiwan melalui *New Southbound Policy* di Indonesia pada tahun 2016–2024 dalam memperkuat hubungan ekonomi Taiwan–Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi instrumen diplomasi ekonomi yang digunakan Taiwan serta menganalisis orientasi *business end* dan *power play end* dalam pelaksanaannya di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa hubungan Internasional, khususnya dalam kajian mengenai kebijakan *New Southbound Policy* di Indonesia. Penelitian ini juga medapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam membahas hubungan ekonomi Taiwan dan Indonesia serta kajian diplomasi ekonomi dalam studi hubungan internasional.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas serta juga mahasiswa/i hubungan internasional untuk memahami lebih baik terkait perkembangan hubungan ekonomi Taiwan dan Indonesia melalui *New Southbound Policy*.

1.6 Studi Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan lima literatur ilmiah yang berkaitan dengan fenomena yang sedang di teliti oleh peneliti dan dapat digunakan sebagai dasar untuk memperdalam analisis terkait permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini. Berikut beberapa rujukan yang peneliti gunakan menjadi referensi utama antara lain:

Literatur pertama berjudul “*Taiwan’s New Southbound Policy its Geopolitical Implications in Asia*” oleh Norah M. Huang. Artikel jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana kebijakan *New Southbound Policy* Taiwan membawa implikasi geopolitik yang signifikan bagi Kawasan Asia, terutama dalam konteks membendung pengaruh Tiongkok, dengan meningkatkan peran Taiwan sebagai mitra ekonomi dan menumbuhkan lingkungan regional Kawasan Asia yang lebih

seimbang. Disini dijelaskan bagaimana Kebijakan *New Southbound Policy* memberikan kemitraan alternatif bagi negara-negara Asia Tenggara untuk mencegah Tiongkok mengubah Kawasan ini menjadi lingkup pengaruhnya yang eksklusif. Melalui ekonomi, pembangunan, sosial dan budaya Taiwan mendorong negara Mitra untuk membangun stabilitas regional, mengurangi ketergantungan ekonomi pada Tiongkok.¹⁵

Artikel jurnal ini menekankan bahwa kebijakan *New Southbound Policy* Taiwan bukan sekedar kebijakan ekonomi, tetapi strategi geopolitik yang dibentuk untuk merespon tekanan struktural dari Tiongkok. Dengan itu Jurnal ini berkontribusi memberikan kerangka analitis yang melihat *New Southbound Policy*, sebagai kebijakan diplomasi ekonomi yang sarat akan kepentingan strategis. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus analisis dan ruang lingkupnya. Jurnal ini berfokus pada implikasi geopolitik secara umum di Kawasan Asia sedangkan penelitian ini secara spesifik memfokuskan pada mengkaji diplomasi ekonomi Taiwan dalam *New Southbound Policy* di Indonesia.

Literatur kedua berjudul “*Mapping out Taiwan Indonesia Bilateral Cooperation: Establishing Interdependence on People-to-People Connectivity*” oleh Juan Carlos Melkis, Gilang Nur Alam dan Windy Dermawan. Jurnal ini mengeksplorasi strategi yang digunakan Taiwan dalam kerja sama bilateral dengan Indonesia, dibawah kerangka *New Southbound Policy* yang fokus pada pengembangan konektivitas *People-to-People* dari 2016 sampai 2024. Jurnal ini

¹⁵ Norah M Huang, “Taiwan ’ s New Southbound Policy and Its Geopolitical Implications in Asia,” n.d., 26–42.

menyoroti strategi Taiwan dalam menginisiasi program beasiswa, fasilitas visa, promosi pariwisata ramah muslim dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa strategi ini berhasil meningkatkan hubungan bilateral antara kedua negara secara signifikan, kebijakan ini menawarkan Indonesia peluang untuk mengembangkan sumber daya dan peningkatan kesejahteraan imigran dan Taiwan memperoleh konektivitas dengan Indonesia. Inisiatif yang dijalankan dalam kebijakan ini memperkuat ikatan sosial, budaya dan Pendidikan antara Taiwan dan Indonesia, meskipun hubungan kedua negara dibatasi oleh kendala diplomatik karena kepatuhan Indonesia terhadap prinsip *One China Policy*.¹⁶

Perbedaan artikel jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada level analisis dan fokus kajian. Jurnal ini memetakan dan menjelaskan secara deskriptif tentang kerja sama Taiwan dan Indonesia dibawah kerangka kerja *New Southbound Policy*, khususnya pada pilar *people-to-people*. Fokus utama dari jurnal artikel ini adalah bagaimana kerja sama dibawah kerangka *New Southbound Policy* seperti Pendidikan, perlindungan migran, sosial dan budaya dijalankan dan dampaknya pada hubungan bilateral kedua negara. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengkaji diplomasi ekonomi Taiwan dibawah kerangka *New Southbound Policy* di Indonesia.

¹⁶ Juan Carlos Melkis, Gilang Nur Alam, and Windy Dermawan, "MAPPING OUT TAIWAN-INDONESIA BILATERAL COOPERATION: ESTABLISHING INTERDEPENDENCE ON PEOPLE-TO-PEOPLE CONNECTIVITY" 6, no. 1 (2025): 95–104, <https://doi.org/10.11594/ijssr.06.01.0>.

Literatur ketiga berjudul “*Economic Relationship between Taiwan and ASEAN and the Implications of the New Southbound Policy*” oleh Roy Chun Lee. Artikel jurnal ini membahas dinamika hubungan ekonomi yang terjalin antara Taiwan dengan negara mitra ASEAN dan memaparkan implikasi penerapan *New Southbound Policy*. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Taiwan selama berapa decade sangat dipengaruhi oleh industry ICT dan semikonduktor serta ketergantungan ekonomi yang kuat dengan Tiongkok. Namun dengan adanya perubahan kondisi global seperti adanya revalitas antara kekuatan besar seperti Amerika dan Tiongkok dan persaingan ekonomi antara negara berkembang yang semakin meningkat mendorong Taiwan untuk melakukan diverifikasi ekonomi. Kebijakan *New Southbound Policy* diperkenalkan untuk memperluas hubungan ekonomi Taiwan dengan Negara-negara Asia Tenggara melalui peningkatan perdagangan dan investasi. Jurnal ini juga menyoroti peluang dan tantangan yang dihadapi Taiwan dalam memperdalam kerja sama dengan negara ASEAN di tengah dinamika ekonomi global.¹⁷

Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah jurnal ini membahas mengenai latar belakang kebijakan *New Southbound Policy* serta membahas peluang dan tantangan yang dihadapi Taiwan dalam mendiverifikasi ekonomi ke negara ASEAN. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada diplomasi ekonomi Taiwan dibawah kerangka *New Southbound Policy* konsep di Indonesia.

¹⁷ Roy Chun Lee and Gordon Sun, “Economic Relationship between Taiwan and ASEAN and the Implications of the New Southbound Policy,” n.d., 65–104.

Literatur ke keempat berjudul “*Indonesia Interest: Between Taiwan’s NSP and Tiongkok’s BRI*” oleh Muhamad Iksan. Artikel jurnal ini membahas posisi strategis Indonesia di tengah kebijakan New Southbound Policy Taiwan dan Belt Road Initiative Tiongkok. Dengan kebijakan luar negeri bebas aktif, Indonesia menyeimbangkan hubungan bilateral dengan Tiongkok dan Taiwan. Untuk mencapai visi ekonomi Indonesia di tahun 2045 Indonesia berkerja sama dengan BRI Tiongkok dalam pengembangan infrastruktur dan bekerja sama dengan Taiwan dalam kebijakan NSP yang berfokus pada konektivitas *People-to-people*, Pendidikan, sumber daya manusia dan kerja sama ekonomi.¹⁸

Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah jurnal ini fokus dan menitikberatkan kajian pada diplomasi publik dan kepentingan Indonesia di tengah dua kebijakan besar BRI dan NSP. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus pada diplomasi ekonomi Taiwan dan kepentingan strategis Taiwan dibalik penggunaan instrumen ekonomi. Penelitian ini dapat mengisi ruang yang belum dijelajahi dengan fokus pada diplomasi ekonomi Taiwan melalui *New Southbound Policy* di Indonesia.

Literatur kelima berjudul “*The Complex Interdependency Between Taiwan and Indonesia Through the Implementation of New Southbound Policy*” oleh Dama Rifki Adhiprama dan Ali Maksum. Artikel jurnal ini menjelaskan tentang hubungan rumit yang terjalin antara Taiwan dan Indonesia dibawah tekanan Prinsip *One China Policy*, artikel jurnal ini berfokus membahas saling ketergantungan yang

¹⁸ Muhamad Iksan, “Indonesia Interest : Between Taiwan ’ s NSP and China ’ s BRI 1,” no. 1 (n.d.): 1–20.

kompleks antara Indonesia dengan Taiwan dalam konteks perdagangan, investasi dan kerja sama lainnya. Baik Taiwan maupun Indonesia sama-sama mendapatkan manfaat dari implementasi kebijakan *New Southbound policy* melalui kolaborasi industri-akademik, pertanian, dan melalui imigran. Artikel jurnal ini mendidifenisikan kembali peran kebijakan *New Southbound Policy* dalam pembangunan di Asia Selatan tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam kemajuan Indonesia.¹⁹

Artikel jurnal ini memberikan kerangka konseptual bahwa kebijakan *New Southbound Policy* sebagai instrumen hubungan luar negeri Taiwan, terutama di tengah keterbatasan status diplomatik Taiwan. Perbedaan tulisan ini dengan penelitian ini terdapat pada analisis dan Batasan penelitian, tulisan ini membahas kompleksnya hubungan saling ketergantungan antara Taiwan dan Indonesia melalui impelmentasi kebijakan *New Southbound policy*. Penelitian ini dapat mengisi ruang yang belum dijelajahi dengan fokus pada *New Southbound Policy* Taiwan ke Indonesia melalui konsep diplomasi ekonomi.

1.7 Kerangka Pemikiran

1.7.1 Diplomasi Ekonomi

Diplomasi ekonomi merupakan sarana hubungan diplomatik untuk mendukung sektor ekonomi baik itu dalam perdagangan, keuangan suatu negara dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam mencapai tujuan kebijakan luar negeri

¹⁹ Dama Rifki Adhipramana and Ali Maksum, "The Complex Interdependency Between Taiwan and Indonesia Through the Implementation of New Southbound Policy" 209, no. Iconpo 2021 (2022): 433–43.

tertentu.²⁰ Diplomasi ekonomi sebagai alat untuk mencapai tujuan politik luar negeri dan kepentingan nasional. Dalam praktiknya diplomasi ekonomi dilakukan melalui perjanjian formal ataupun negosiasi oleh pejabat negara tanpa melalui kekerasan dan propaganda.²¹ Pengertian lain dari diplomasi ekonomi adalah serangkaian aktifitas ekonomi seperti ekspor, impor, investasi, sanksi ekonomi dan bantuan luar negeri yang melewati lintas batas negara dan dilakukan oleh para aktor baik aktor negara maupun non-negara. Diplomasi ekonomi sekarang dijadikan sebagai upaya utama dalam membangun relasi dengan negara lain dengan mengarahkan segala sumber daya yang dimiliki untuk membangun kekuatan ekonomi dan mengejar kepentingannya.²²

Penelitian ini merujuk pada kerangka pemikiran Maaïke Okano-Heijmans, khususnya dalam bukunya *Conceptualizing Economic Diplomacy: The Crossroads of International Relations, Economics, IPE and Diplomatic Studies*.²³ Dalam buku ini Okano-Heijmans menawarkan pemahaman yang diplomasi ekonomi sebagai perwujudan diplomasi ekonomi menurut Okano Heijmans merupakan strategi negara dalam memanfaatkan instrumen ekonomi untuk mencapai kepentingan negara. Keamanan ekonomi mencakup kemakmuran ekonomi dan stabilitas politik negara. Oleh karena itu dalam diplomasi ekonomi pemerintah melibatkan berbagai instrumen yang bersifat ekonomi maupun politik. Dengan kata lain,

²⁰ Miguel Santos Neves, "Economic Diplomacy, Geo-Economics and the External Strategy of Portugal," *Janus.Net* 8, no. 1 (2017): 88–118.

²¹ Dinamika Global, "Dinamika Global | Volume 01 | No.1 | Juni 2016" 01, no. 1 (2016): 14–31.

²² Made Suraharta Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, *New, The Diplomacy, Economic*, n.d.

²³ Maaïke Okano-Heijmans, "Conceptualizing Economic Diplomacy: The Crossroads of International Relations, Economics, IPE and Diplomatic Studies," *The Hague Journal of Diplomacy* 6, no. 1–2 (2011): 7–36, <https://doi.org/10.1163/187119111X566742>.

instrumen dan tujuan akhir dapat bersifat ekonomi maupun politik. Okano memposisikan diplomasi ekonomi kedalam spektrum yang bersifat dinamis dan tidak Tunggal. Spektrum ini bergerak dari dua kutub, yakni *power play end* yang berorientasi politik-strategis dan *business end* yang berorientasi ekonomi.

Pada kutub pertama pada sisi *power play end* diplomasi ekonomi dilihat sebagai instrumen kekuasaan negara yang digunakan untuk mencapai kepentingan strategis, dalam praktiknya negara menggunakan (*inducements*) bantuan luar negeri berupa hibah atau pinjaman, bantuan kemanusiaan, memberikan akses teknologi dan memberikan ke anggotaan organisasi internasional. Diplomasi finansial (*financial diplomacy*) berupa perjanjian pertukaran mata uang, kebijakan nilai tukar, pembelian dan penjual obligasi pemerintah, pengendalian modal. Sanksi ekonomi (*negative sanctions*) berupa embargo ekspor, boikot ekspor, pembekuan aset, penghentian bantuan, hambatan investasi dan di daftar hitamkan. Sementara di kutub *business end* menitikberatkan pada dimensi praktis yang bergerak ke tujuan ekonomi seperti diplomasi perdagangan (*trade diplomacy*) berupa perjanjian perdagangan bebas, negosiasi perdagangan, tarif, lisensi ekspor dan impor, kebijakan anti dumping dan kuota perdagangan. Lalu diplomasi komersial *Commercial diplomacy* berupa promosi perdagangan, promosi investasi, advokasi bisnis, promosi wisata dan promosi investasi yang bertanggung jawab.

Dalam praktiknya, strategi yang dijalankan cenderung mengabungkan instrumen element politik dengan elemen ekonomi yang dijalankan dalam bentuk koordinasi lintas sektor, melalui forum bilateral, multilateral, serta saluran informal seperti pertemuan bisnis dan pameran dagang. Hal ini menggambarkan bahwa

diplomasi ekonomi modern bersifat jaringan tidak hanya terpusat pada negara. Okano menawarkan kerangka analisis (*analytical framework*) yang menekankan pentingnya pemahaman atas dimensi konstekstual, arena interaksi, proses diplomasi dan instrumen diplomasi digunakan untuk menganalisis bagaimana diplomasi ekonomi dijalankan dalam praktiknya.²⁴

Pada bagian variabel utama, yaitu tahapan variabel Konteks yaitu lingkungan eksternal yang membentuk batasan, arah, dan ruang gerak dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi, elemen ini mencakup faktor-faktor yang berasal dari kondisi politik, ekonomi dan perdagangan internasional yang mempengaruhi strategi diplomatik suatu negara. konteks mencakup latar belakang struktural dan situasional, baik domestik maupun internasional yang mempengaruhi strategi diplomasi ekonomi suatu negara. Dimensi konteks membentuk pertimbangan para pembuat kebijakan dalam menentukan bagaimana kepentingan nasional dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi politik dan ekonomi negara.²⁵

Analisis variabel ini menganalisis kondisi yang melatar belakangi Taiwan memperkuat hubungan ekonominya dengan Indonesia melalui *New Southbound Policy*. Dari sisi Taiwan tekanan *One China Policy* yang mempersempit ruang diplomatik formal Taiwan. Dominasi Tiongkok di Kawasan Indo-Pasifik dan ketergantungan ekonomi Taiwan terhadap pasar Tiongkok saat ini mendorong Taiwan merebut pengaruhnya dan membangun kemitraan dengan negara di

²⁴ Okano-Heijmans.

²⁵ Okano-Heijmans.

Kawasan dengan memprioritaskan penguatan aliansii dan diversifikasi ekonomi dengan negara Indo-Pasifik seperti Indonesia.²⁶

Kemudian yang selanjutnya adalah pada variabel teater mengacu pada arena atau ruang tempat diplomasi ekonomi dijalankan oleh negara, baik melalui saluran formal maupun nonformal. Arena tersebut dapat mengacu pada interaksi negara dalam hubungan bilateral, organisasi regional dan internasional, forum ekonomi, maupun jaringan bisnis yang menjadi wadah interaksi para aktor yang terlibat. Dimensi ini berfokus pada berbagai forum yang menjadi wadah dalam interaksi ekonomi dalam hubungan bilateral maupun forum ekonomi dan bisnis antara kedua negara.²⁷

Dalam penelitian ini variabel teater digunakan untuk mengidentifikasi arena-arena yang digunakan Taiwan sebagai ruang dalam interaksi ekonomi dengan Indonesia. Karena keterbatasan dalam menjalin hubungan diplomatik formal, Taiwan membangun kamar dagang *Taipei Economic and Trade Office* (TETO) yang dibangun di Jakarta dan Surabaya. Kantor dagang ini sebagai perwakilan pemerintahan Taiwan di Indonesia untuk mempromosikan hubungan bilateral antar kedua negara.²⁸ Dan di Taiwan Indonesia membangun Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei. Kolaborasi kamar dagang kedua negara berupa forum Indonesia-Taiwan Industrial Collaboration Forum (ITICF) ini bertujuan untuk menjadi wadah dalam hubungan ekonomi khususnya

²⁶ ROC Taiwan, "Presiden Tsai Ing-Wen Mengadopsi Pedoman New Southbound Policy."

²⁷ Okano-Heijmans, "Conceptualizing Economic Diplomacy: The Crossroads of International Relations, Economics, IPE and Diplomatic Studies."

²⁸ "Taipei Economic and Trade Office (TETO)," n.d., https://www.roc-taiwan.org/id_en/index.html.

peningkatan kapasitas industri yang dilakukan melalui kerja sama industri di berbagai sektor antara Indonesia dan Taiwan. Melalui kolaborasi ini tercapainya peningkatan efektivitas produksi, pengembangan riset dan teknologi, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia antar kedua negara.²⁹

Selanjutnya variabel Proses mengarah pada pelaksanaan diplomasi ekonomi yang dipengaruhi oleh interaksi antara aktor negara dan non-negara yang dibangun serta dipraktikkan. Dalam hal ini, Proses yang dimaksud adalah bagaimana pelaksanaan diplomasi ekonomi yang terbentuk melalui interaksi antara aktor negara dan non-negara. Dimensi ini menekankan strategi koordinasi, serta penggunaan instrumen diplomasi ekonomi yang digunakan untuk mencapai tujuan, serta mempertimbangkan kepentingan dan motivasi para aktor yang terlibat. Dimensi ini menganalisis bagaimana diplomasi ekonomi Taiwan dijalankan melalui perorganisasian tindakan, pengambilan keputusan, pelibatan berbagai aktor seperti pemerintah, kantor perwakilan, asosiasi bisnis serta pelaku usaha yang ikut berperan.³⁰

Dalam penelitian ini, dimensi proses digunakan untuk menganalisis bagaimana Taiwan mengonstruksikan dan menjalankan diplomasi ekonominya di Indonesia. Proses diplomasi ekonomi dijalankan dengan melibatkan misi dagang, pameran internasional, dan kerja sama bilateral yang mempertemukan aktor pemerintah dan non pemerintah. penelitian ini menganalisis proses koordinasi

²⁹ “Penguatan Kerja Sama Industri Melalui Penyelenggaraan Indonesia - Taiwan Industrial Collaboration Forum Ke - 5 (ITICF),” n.d., <https://www.kdei-Taipei.org/news/penguatan-kerja-sama-industri-melalui-penyelenggaraan-indonesia-taiwan-industrial-collaboration-forum-ke-5-iticf-2258.html>.

³⁰ Okano-Heijmans.

antara aktor negara Taiwan seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ekonomi, TETO, dan TAITRA dengan aktor non-negara seperti pelaku industri manufaktur yang berinvestasi di Indonesia. Mekanisme negosiasi bilateral melalui pertemuan rutin IETO-TETO menjadi platform utama di mana proses diplomasi ekonomi berlangsung dan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang digunakan Taiwan dalam mempertahankan hubungan dengan Indonesia keterbatasan yang dihadapi akibat tidak adanya hubungan diplomatik formal.³¹

terkait variabel tools yang merujuk pada instrumen yang digunakan negara dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi untuk mencapai tujuan kebijakan luar negerinya. Variabel ini mencakup perangkat formal dan informal dari negara yang memungkinkan untuk mempengaruhi mitra ekonomi dan memfasilitasi kepentingan nasional di ranah internasional. Instrumen yang digunakan negara dalam diplomasi ekonomi dalam kerangka analisis Okano di analisis berdasarkan lima bentuk diplomasi ekonomi dalam kerangka konseptual, yaitu *commercial diplomacy*, *trade diplomacy*, *financial diplomacy*, *inducements*, dan *sanctions* yang sesuai dengan kebijakan yang dijalankan.

Melalui variabel ini peneliti dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk kebijakan dan tindakan yang dilakukan negara untuk yang dapat mempengaruhi aktor lain. Dimensi ini mengidentifikasi instrumen apa yang di pakai Taiwan dalam menjalankan *New Southbound Policy* di Indonesia, seperti promosi perdagangan, dan investasi, forum kerja sama industri, perkembangan sumber daya, serta

³¹ KDEI, "Dorong Kerja Sama Perindustrian, KDEI Taipeii Fasilitas The 4th Indonesia-Taiwan Industrial Collaboration Forum," n.d.

berbagai program kerja sama ekonomi lainnya. Selanjutnya instrumen-instrumen tersebut di analisis untuk mengetahui bentuk diplomasi ekonomi yang paling dominan digunakan Taiwan di Indonesia berdasarkan kerangka konseptual Okano.³²

Pendekatan ini memandang negara bukan sebagai entitas tunggal melainkan sebagai aktor kompleks yang mengintegrasikan berbagai elemen dengan peran dan kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu diplomasi ekonomi tidak hanya bertumpu pada satu peran kementerian luar negeri, namun juga melibatkan kementerian ekonomi, institusi negara, sektor swasta. Melalui keterlibatan berbagai aktor tersebut, diplomasi ekonomi yang dijalankan negara menjadi suatu proses yang dibangun melalui koordinasi dan interaksi antara aktor dalam upaya mencapai kepentingan negara.³³

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan utama yang digunakan oleh peneliti untuk mencapai tujuan serta menjawab rumusan masalah. Metode menjadi tahapan penting dalam proses penelitian karena menentukan cara bagaimana masalah dipecahkan melalui tahapan prosedur dan langkah-langkah penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

³² Okano-Heijmans, "Conceptualizing Economic Diplomacy: The Crossroads of International Relations, Economics, IPE and Diplomatic Studies."

³³ Okano-Heijmans, "Conceptualizing Economic Diplomacy: The Crossroads of International Relations, Economics, IPE and Diplomatic Studies."

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Untuk menjelaskan pertanyaan penelitian dan melihat validitas penelitian yang akan dilakukan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Metode kualitatif sendiri merupakan pendekatan yang menitikberatkan analisis pada informasi dengan memanfaatkan sumber data berupa tulisan maupun informasi lisan dari objek yang dapat diamati secara langsung. Data tersebut dapat berupa pidato dan bentuk-bentuk komunikasi lainnya yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian dengan cara yang lebih mudah dipahami dengan penerapan konsep sesuai dengan fenomena yang terjadi.³⁴

Jenis penelitian deskriptif-analitis digunakan untuk memaparkan secara sistematis bentuk-bentuk diplomasi ekonomi yang di jalankan oleh Taiwan, serta menganalisis bagaimana ekonomi digunakan dalam kerja sama bilateral. Penelitian ini mengandalkan analisis data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, laporan institusi terkait, pemberitaan diplomatik serta literatur akademik yang relevan dengan topik penelitian. Oleh karena itu, penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dinilai relevan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait Bagaimana Taiwan menjalankan diplomasi ekonomi melalui *New Southbound Policy* di Indonesia pada tahun 2016-2024.³⁵

1.8.2 Batasan Penelitian

³⁴ Marjoe L. DeVault Steven J Taylor, Robertt bogdan, *Introduction Qualitative Research Methods*, n.d.

³⁵ Steven J Taylor, Robertt bogdan.

Peneliti menetapkan batasan untuk penelitian kajian diplomasi ekonomi yang dilakukan Taiwan di Indonesia dibawah kerangka kerja sama *New Southbound Policy* pada tahun 2016 hingga tahun 2024. Rentang tahun ini dipilih karena pada tahun 2016 kebijakan *New Southbound Policy* pertama kali diluncurkan dibawah kepemimpinan Presiden Tsai Ing-wen dan tahun 2024 berakhirnya masa pemerintahan Presiden Tsai Ing-wen. Pembatasan penelitian hingga berakhirnya masa pemerintahan Presiden Tsai Ing-wen dikarenakan dibawah pemerintahan Presiden terpilih Lai Ching-te, kebijakan *New Southbound Policy* mengalami perluasan menjadi *New Southbound Policy +*. Perubahan ini memperluas fokus kebijakan kebidang teknologi dan rantai pasok digital.³⁶ Fokus utama penelitian ini diarahkan pada bagaimana Taiwan menjalankan diplomasi ekonomi melalui *New Southbound Policy* di Indonesia pada tahun 2016-2024.

1.8.3 Unit dan Level Analisis

Dalam konteks penelitian, konsep unit analisis dipahami sebagai objek atau aktor yang perilakunya menjadi fokus utama untuk penelitian yang menjadi hasil dari pengaruh faktor lain. Dalam penelitian ini, objek yang akan dijelaskan adalah praktik diplomasi ekonomi Taiwan. Dan unit eksplanasi merujuk pada fenomena, faktor, atau masalah yang mempengaruhi unit analisis, dalam penelitian unit eksplanasinya adalah kebijakan *New Southbound Policy* Taiwan ke Indonesia.³⁷

³⁶ “President Lai Addresses Opening of 2025 Yushan Forum,” 2025, <https://english.gov.tw/News/6921>.

³⁷ Mohtar Mas’oed, “Pendekatan Saintifik Dalam Ilmu Sosial,” *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi*, 1990.

Level analisis merujuk pada kedudukan dari unit yang menjadi fokus penelitian, yang dapat berupa individu, kelompok, negara, wilayah regional atau bahkan sistem internasional. Penetapan tingkatan analisis penting dilakukan agar peneliti dapat lebih mudah menguraikan mengapa aktor dalam hubungan internasional melakukan suatu tindakan tertentu termasuk bagaimana cara suatu aktor melakukannya, lalu level analisis juga memperjelas batasan dan ruang lingkup penelitian secara detail. Level analisis yang digunakan dalam penelitian ini berada pada tingkat negara, karena subjek utama yang di analisis dipenelitian ini adalah interaksi dari dua aktor negara, yakni Taiwan dan Indonesia. Dengan menggunakan tingkat analisis peneliti dapat menjelaskan bagaimana negara menjalankan diplomasi ekonominya.³⁸

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, sehingga Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data sekunder dan primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dan belum diolah lebih spesifik oleh pihak lain.³⁹ Dalam penelitian ini, data primer yang akan peneliti gunakan adalah pernyataan resmi atau press release dari pemerintah dan salinan atau transkrip dari pernyataan resmi pejabat negara atau pidato kenegaraan. Data primer peneliti dapatkan dari situs pemerintah seperti situs *Ministry of foreign Affairs Taiwan* (en.mofa.gov.tw), *Ministry of Economic Affairs Taiwan* (moea.gov.tw), *Executive Yuan*

³⁸ Mas'oed.

³⁹ Mohamad Muspawi Undari Sulung, "Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 25," *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 2 (2024): 28–33.

(English.ey.gov), *Taiwan External Trade Council* (taitra.org) , *Taipe Economic and Trade Office* (taiwanembassy.org).

Sedangkan data sekunder adalah data yang telah melalui proses pengolahan, analisis atau publikasi oleh peneliti atau lembaga sebelumnya. Data sekunder diperoleh melalui karya-karya akademik seperti artikel jurnal ilmiah, dokumen, buku, laporan penelitian serta sumber lain yang tervalidasi yang relevan dengan penelitian.⁴⁰ Dalam penelitian ini sumber sekunder yang digunakan literatur akademik dari penulis seperti Alan Hao Yang, Jhe-Lin Lee, Chih-Cheng Hsu, Chi Su, Tse-Kang Leng, Yu-Shan Wu, Ricahrd C. Bush, Paramitaningrum, Ali Maksum. Untuk membangun kerangka analitis mengenai diplomasi ekonomi Taiwan ke Indonesia berupa literatur dari Okano Heijmans.

Selain literatur akademik penelitian ini juga menggunakan sumber dari laporan lembaga internasional seperti *International Trade Administration* (trade.gov.tw) Kantor Dagang dan Ekono Indonesia Di Taipe (kdei-Taipe.org), kementerian investasi dan hiliarisasi/BPKM (ppid.bpk.go.id), Satu data Perdagangan (satudata.kemendag.go.id), Direktorat Jendral Industri kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian (ikm.kemenperin.go.id), *Asian Development Bank* (ADB), *World Trade Organization* (WTO), *Global Taiwan Institute* (GTI), *The Habibie Center* (THC) *Center For Strategic and Internasional Studies* (CSIS), *Taiwan-Asia Exchage Foundation* (TAEF), *Yusof Ishak Institute* (ISEAS), *ASEAN Institute of Strategic and Internasional Studies* (ASEAN-ISIS) *The Observatory of*

⁴⁰ Undari Sulung.

Economic Complexity (OEC). Dan untuk memperkaya analisis, penelitian ini juga menggunakan sumber dari laporan media masa Internasional maupun nasional, seperti media masa nasional Taiwan *Taiwan Today* (taiwantoday.tw), *Focus Taiwan* (focustaiwan.tw), *Reuters* (reuters.com), *BBC News* (bbc.com/news), *CNN* (cnn.com), *The New York Times* (nytimes.com), media lokal *Antara News* (antaranews.com), *Tempo.co* (tempo.co), dan *Kompas* (kompas.com).

1.8.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan menganalisisnya secara mendalam. Data-data sekunder yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber studi pustaka seperti jurnal, berita, buku dan laporan terkait yang peneliti gunakan dianalisis menggunakan teknik analisis data yang diperkenalkan oleh John Ward Creswell dalam bukunya “*Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approach*” yang menjelaskan lima tahapan dalam analisis data.⁴¹

1. Menyiapkan data untuk di analisis

Pada tahap pertama, peneliti mengorganisasikan dan mempersiapkan data yang berkaitan dengan pelaksanaan New Southbound Policy Taiwan di Indonesia selama periode 2016–2024. Data yang diperoleh diseleksi berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian, kemudian dikelompokkan berdasarkan bentuk hubungan ekonomi yang menjadi fokus penelitian, yaitu perdagangan, investasi, dan kerja

⁴¹ Creswell, “Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approach,” n.d.

sama ekonomi pendukung. Data tersebut mencakup informasi mengenai aktivitas perdagangan Taiwan Indonesia, investasi Taiwan di Indonesia, serta kerja sama dalam bidang pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, pembangunan, dan kerja sama teknis. Peneliti juga mengelompokkan data berdasarkan tahun, aktor, sektor, bentuk kegiatan, serta keterkaitannya dengan tujuan New Southbound Policy⁴²

2. Membaca dan mengumpulkan data

Setelah proses penyiapan data selesai dilakukan, peneliti membaca keseluruhan data yang telah dikumpulkan untuk memperoleh pemahaman umum mengenai hubungan ekonomi Taiwan–Indonesia dalam kerangka New Southbound Policy. Pembacaan dilakukan untuk memahami perkembangan kebijakan, bentuk kegiatan, aktor yang terlibat, tujuan ekonomi, serta informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan hubungan ekonomi Taiwan Indonesia selama periode 2016–2024. Pada tahap ini, peneliti menyusun catatan mengenai informasi penting yang berkaitan dengan promosi perdagangan, investasi, kerja sama industri, pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, teknologi, dan kerja sama teknis. Catatan tersebut digunakan untuk menentukan data yang relevan dengan fokus penelitian.⁴³

3. Mendeskripsikan dan merumuskan data menjadi sebuah tema

Pada tahap ketiga, peneliti mengklasifikasikan dan mengelompokkan informasi berdasarkan substansi serta keterkaitannya dengan fokus penelitian. Data mengenai

⁴² Creswell.

⁴³ creswell

pelaksanaan diplomasi ekonomi Taiwan melalui New Southbound Policy di Indonesia dikelompokkan ke dalam beberapa tema, yaitu promosi perdagangan dan perluasan pasar, promosi investasi dan kerja sama industri, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, serta penguatan hubungan kelembagaan dan jejaring bisnis. Pengelompokan tersebut dilakukan untuk menemukan keterkaitan antara berbagai kegiatan ekonomi Taiwan dengan konsep diplomasi ekonomi yang digunakan dalam penelitian. Dengan demikian, proses analisis tidak dilakukan melalui coding formal, tetapi melalui seleksi, kategorisasi, dan interpretasi data berdasarkan tema penelitian.⁴⁴

4. Menafsirkan data

Pada tahap keempat, peneliti menafsirkan data dan tema yang telah dikembangkan dengan menggunakan kerangka diplomasi ekonomi Maaiké Okano-Heijmans. Interpretasi dilakukan dengan menganalisis aktor, instrumen, tujuan ekonomi, serta fungsi diplomatik dari setiap kegiatan Taiwan di Indonesia. Peneliti kemudian menghubungkan data empiris dengan konsep diplomasi ekonomi untuk menjelaskan bagaimana kegiatan perdagangan, investasi, kerja sama industri, pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia digunakan Taiwan untuk mendukung kepentingan ekonomi serta memperkuat hubungan dengan Indonesia.⁴⁵

5. Menyajikan data

⁴⁴ Creswell, "Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approach."

⁴⁵ Creswell.

Pada tahap kelima, hasil analisis disajikan secara naratif dan sistematis berdasarkan tema yang telah dikembangkan. Penyajian dilakukan dengan menguraikan data empiris, menjelaskan aktor dan bentuk kegiatan, menghubungkan temuan dengan kerangka diplomasi ekonomi Maaie Okano-Heijmans, serta memberikan interpretasi terhadap hubungan antara kegiatan ekonomi Taiwan dan tujuan New Southbound Policy. Hasil penyajian dan interpretasi tersebut digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai pelaksanaan diplomasi ekonomi Taiwan melalui New Southbound Policy di Indonesia selama periode 2016–2024.⁴⁶

1.9 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pembahasan mengenai latar belakang yang diikuti dengan penulisan rumusan masalah, pernyataan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran yang digunakan, metodologi penelitian yang berisikan jenis penelitian, batasan masalah, unit analisis dan tingkat analisis, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan kemudian diikuti dengan sistematika penulisan

BAB II DINAMIKA HUBUNGAN TAIWAN DAN LATAR BELAKANG NEW SOUTBOUND POLICY

⁴⁶ Creswell.

Bab ini menjelaskan kondisi politik Taiwan yang dan keterbatasan hubungan diplomatik Taiwan akibat *One China Policy* serta bab ini akan menjelaskan kondisi yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan *New Southbound Policy* Taiwan.

BAB III INDONESIA DALAM NEW SOUTHBOUND POLICY TAIWAN

Bab ini akan menjelaskan posisi Indonesia dalam kebijakan *New Southbound Policy* Taiwan, serta menjelaskan perkembangan hubungan ekonomi Taiwan dan Indonesia, dan pengaruh *One China Policy* dalam hubungan Taiwan dan Indonesia

BAB IV DIPLOMASI EKONOMI TAIWAN MELALUI NEW SOUTHBOUND POLICY DI INDONESIA

Bab ini akan menjelaskan mengenai bagaimana diplomasi ekonomi Taiwan di Indonesia dibawah kerangka *New Southbound Policy* dengan menggunakan Teori diplomasi ekonomi oleh Okano Heijmans

BAB V PENUTUP

Bab ini bagian terakhir berisi Kesimpulan dari hasil penelitian mengenai diplomasi ekonomi Taiwan melalui *New Southbound Policy* ke Indonesi yang sebelumnya sudah dijelaskan di bab-bab sebelumnya dan saran untuk penelitian selanjutnya.